

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Habib (2018) bertujuan untuk menganalisis penentu kelambatan laporan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan variabel musim audit meningkatkan keterlambatan laporan audit, sedangkan afiliasi Big 4, layanan nonaudit, dan masa kerja auditor mengurangi keterlambatan laporan audit. Di antara penentu tata kelola perusahaan, keberadaan anggota ahli keuangan di komite audit, dan konsentrasi kepemilikan, mengurangi kelambatan laporan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Liwe dkk (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, dan solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto (2017) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014 dan 2015, yang menghasilkan 254 sampel perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa solvabilitas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan reputasi perusahaan audit, kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada tahun 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016) bertujuan untuk mengetahui faktor penentu *audit delay* di antara perusahaan-perusahaan Palestina yang terdaftar di Palestine Stock Exchange (PSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan audit dipengaruhi oleh ukuran dewan, ukuran

perusahaan, status perusahaan audit, kompleksitas perusahaan, keberadaan komite audit, dan dispersi kepemilikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prameswari dan Yustrianthe (2015) bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa size, solvabilitas dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan profitabilitas dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Laksito (2015) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan LQ 45 di BEI periode 2010-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran variabel perusahaan, jenis industri, pendapat auditor, dan reputasi Kantor Akuntan Publik secara signifikan mempengaruhi variabel *audit delay*. Faktor Profitabilitas dan Solvabilitas menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Anisykurlillah (2014) bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh size, laba, opini audit, dan ukuran KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian ini adalah secara parsial variabel laba dan opini berpengaruh terhadap *audit delay*. Variabel size dan KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan secara simultan, seluruh variabel penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Modugu et al. (2012) bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penundaan audit dan beberapa karakteristik perusahaan di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentu utama penundaan audit di Nigeria termasuk koneksi multinasionalitas perusahaan adalah ukuran perusahaan dan biaya audit yang dibayarkan kepada auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Afify (2009) bertujuan untuk mengetahui faktor penentu keterlambatan laporan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dewan, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit secara signifikan mempengaruhi keterlambatan laporan audit. Namun di sisi lain, konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan laporan audit. Ukuran perusahaan, industri dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi keterlambatan laporan audit.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Auditing

2.2.1.1. Pengertian Auditing

Jasa auditing telah digunakan secara luas baik pada perusahaan swasta maupun pemerintah. Alasan ekonomi yang mendorong diperlukannya auditing di latar belakang pada kondisi masyarakat yang semakin kompleks dan menghindari ketidakakuratan suatu laporan.

Secara umum auditing atau pemeriksaan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian aserti manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Mahmudi, 2013)

Auditing adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. (Mulyadi, 2010)

Menurut Arens dan Leobbecke (2012) mengatakan auditing adalah “proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan”.

Menurut Agoes (2012) auditing adalah suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dalam auditing ada lima konsep dasar yang dikemukakan oleh Mautz dan Sharaf (1993) dalam Sari (2011) yaitu:

- 1) Bukti (*evidence*), tujuannya adalah untuk memperoleh pengertian, sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan, yang dituangkan dalam pendapat auditor.

Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan.

- 2) Kehati-hatian dalam pemeriksaan, konsep ini berdasarkan adanya issue pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggungjawab (*prudent auditor*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggung jawab yaitu tanggungjawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Penyajian atau pengungkapan yang wajar, konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar.
- 4) Independensi, yaitu suatu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksanya, dari pembuat dan pemakai laporan-laporan keuangan.
- 5) Etika perilaku, etika dalam auditing, berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit.

Menurut Asmara (1996) dalam Sejati (2007) perlunya laporan keuangan diaudit karena:

1. Adanya perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dengan manajemen sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan tersebut.
2. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan.
3. Kerumitan data
4. Keterbatasan akses pemakai laporan keuangan terhadap catatan-catatan akuntansi.

2.2.1.2. Tujuan Audit

Tujuan umum suatu auditing atas laporan keuangan adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi

berlaku umum. Dalam audit biasanya dirumuskan tujuan khusus audit untuk setiap rekening yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan khusus ini berasal dari asersi-aseri yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan (Jusup, 2010).

Tujuan audit dapat bersifat umum, bisa juga khusus. Tujuan audit diupayakan tercapai dalam semua penugasan dan dituntun oleh lingkup audit yang diberikan manajemen dan dewan komisaris ke kepala bagian audit. Misalnya, auditor mungkin dibatasi hanya untuk menentukan keandalan dan keuangan. Dalam hal ini tujuan umum audit diarahkan untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan regulasi dan pengamanan aktiva. Menurut Mulyadi (2010) menjelaskan antara tujuan audit yang bersifat umum dan khusus.

1. Tujuan Audit Umum

Pada dasarnya tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan melihat tujuan audit spesifik tersebut, auditor akan dapat mengidentifikasi bukti apa yang dapat dihimpun, dan bagaimana cara menghimpun bukti tersebut.

2. Tujuan audit khusus

Tujuan audit khusus lebih diarahkan untuk pengujian terhadap pos pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen.

2.2.1.3. Jenis-Jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes, (2012) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan menurut Agoes (2012), audit bisa dibedakan atas:

1. *Management Audit (Operational Audit)*

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. *Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)*

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

Sementara menurut Mulyadi (2010) jenis audit terdiri dari tiga macam, yaitu audit laporan keuangan (*financial statement audit*), audit operasional (*operasional audit*), dan audit kepatuhan (*compliance audit*).

1. *Financial Statement Audit*

Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sering kali juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

2. *Operational Audit*

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan

sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

3. *Compliance Audit*

Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada perusahaan swasta dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.2.1.4. Standar Auditing

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (IAI, 2016).

Arens (2012) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis.” Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut (IAI, 2016) :

1) Standar Umum

- a) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3) Standar Pelaporan

a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.2.1.5. Laporan Audit

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya (Mulyadi, 2010). Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf yaitu: paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraf lingkup (*scope paragraph*), dan paragraf pendapat (*opinion paragraph*).

Menurut Jusup (2010) laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Didalam menerbitkan suatu laporan audit, auditor harus mematuhi keempat standar pelaporan dalam standar auditing.

2.2.1.6. Opini Audit

Opini audit yaitu opini yang terdapat dalam laporan audit yang merupakan pernyataan pendapat auditor terhadap kewajaran laporan keuangan berdasarkan atas audit yang dilaksanakan dengan menggunakan standar auditing dan atas temuan-temuannya Petronila (2007) dalam Oviek Dewi (2012). Ada empat jenis opini yang diberikan oleh auditor kepada perusahaan. Dalam penelitian ini opini auditor dibagi menjadi dua, yaitu opini selain wajar tanpa pengecualian (selain *Unqualified Opinion*) dan opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*).

2.2.2. Laporan Keuangan

2.2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Mulyadi (2010) adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menerimanya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengertian laporan keuangan menurut Baridwan (2011) adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan menurut Jusup (2010) adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama periode waktu tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Jadi setiap perusahaan *go public* diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Munawir (2014) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

2.2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik adalah sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan investor (Gede, 2004 dalam Trianto, 2006). Hal ini berarti apabila penyampaian laporan keuangan terlambat maka informasi yang didapat akan kehilangan relevansinya dan secara tidak langsung sebagai sinyal buruk bagi perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Fahmi (2011), tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

2.2.3. *Audit Delay*

2.2.3.1. *Pengertian Audit Delay*

Menurut Lawrence dan Briyan (1998) dalam Liwe (2018) *Audit Delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang penting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan.

Perusahaan yang sudah go public harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini auditor kepada BAPEPAM. Peraturan BAPEPAM tersebut diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang publikasi laporan keuangan tahunan audit yang bersifat wajib dengan batas waktu 120 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkannya laporan keuangan yang telah diaudit ke BAPEPAM. Namun, Sejak 30 September 2003, peraturan ini diganti dengan peraturan baru dengan Nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan ke BAPEPAM menjadi 90 hari.

Ketepatwaktuan merupakan kualitas yang berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Waktu antara tanggal laporan keuangan dan laporan audit (*Audit Delay*) mencerminkan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Informasi yang sebenarnya bernilai tinggi dapat menjadi tidak relevan kalau tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Ketepatwaktuan informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar membantu

dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 2011).

Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien sudah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya diatas seratus milyar. Pada dasarnya Ukuran Perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan perusahaan ini didasarkan pada total asset perusahaan (Machfoedz, 1994 dalam Herawaty, 2005). Kategori Ukuran Perusahaan yaitu:

a. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.

c. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

Ukuran Perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki system pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit.

2. Solvabilitas

Hanafi (2009) menyatakan bahwa solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak *solvable* adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total modalnya. Analisis solvabilitas difokuskan terutama pada reaksi dalam neraca yang menunjukkan kemampuan untuk melunasi utang lancar dan utang tidak lancar. Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur Solvabilitas diukur dengan rasio *total debt to total asset ratio* (TDTA) yang membandingkan jumlah aktiva (*total asset*) dengan jumlah utang (baik jangka pendek ataupun jangka panjang). Perhitungan solvabilitas dengan rasio *total debt to total asset* (TDTA) sendiri di hitung dengan rumus:

$$TDTA = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total U tan g}} \times 100\%$$

Solvabilitas diukur dengan *Total Debt to Total Asset ratio* (TDTA), rasio ini membandingkan jumlah utang (baik jangka pendek ataupun jangka panjang) dengan jumlah aset (*total asset*). Alasan yang dapat mendukung hubungan antara *debt to assets ratio* adalah pertama, bahwa *total debt to total assets ratio* mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. Proporsi *total debt to total assets ratio* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Kedua, mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama

dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit utang lebih melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan mengaudit modal. Dengan demikian solvabilitas yang diukur dengan *total debt to total assets ratio* dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit.

3. Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2007) Profitabilitas adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Menurut Kasmir (2016) rasio profitabilitas yakni rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan akan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Profitabilitas) baik dari tingkat penjualan, asset, modal maupun saham tertentu. Dalam rasio Profitabilitas ini dapat dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana perusahaan.

Penelitian ini melakukan perhitungan Profitabilitas dengan *Return On Investment* (ROI), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan tingkat asset tertentu. Profitabilitas mempengaruhi perusahaan yang mengumumkan rugi atau profitabilitas yang rendah. Ini berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh pasar terhadap pengumuman rugi tersebut bagi perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur tingkat profitabilitas yaitu *Return On Investment* (ROI) yang diperoleh dengan persamaan berikut (Martono dan Harjito, 2005):

$$\text{Profitabilitas (ROI)} = \frac{EBIT}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Keterangan :

ROI : Rasio Tingkat Profitabilitas

EBIT : Jumlah laba bersih perusahaan setelah pajak

Total Aktiva : Jumlah asset yang dimiliki perusahaan

Berdasarkan persamaan di atas, maka ROI merupakan perbandingan antara jumlah laba yang dihasilkan terhadap asset yang digunakan, sehingga menunjukkan sejumlah perusahaan mampu untuk menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian kemungkinan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Investment* dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit.

4. Opini Auditor

Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pendapat auditor sangatlah penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan. Auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan. Ada lima tipe pendapat laporan audit yang diterbitkan oleh auditor (Mulyadi, 2010) :

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion report with Explanatory Language*).

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau telah sesuai standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum, tetapi terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (penjelasan lain) laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan.

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit apabila lingkup audit dibatasi klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-

kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun dengan prinsip akuntansi yang berterima umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten.

d. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah: Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Apabila selama pelaksanaan pekerjaan lapangan auditor tidak menemukan masalah ataupun bukti yang sangat menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka auditor mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan kemudian mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan hasil yang diperoleh, tetapi jika auditor menemukan penyimpangan karena laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum kemungkinan auditor akan lebih banyak lagi mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya dapat mempengaruhi penyelesaian waktu audit (Yuana, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan opini yang dikeluarkan oleh auditor dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas dan review penelitian terdahulu dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI.

H₂: Terdapat pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI.

H₃: Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI.

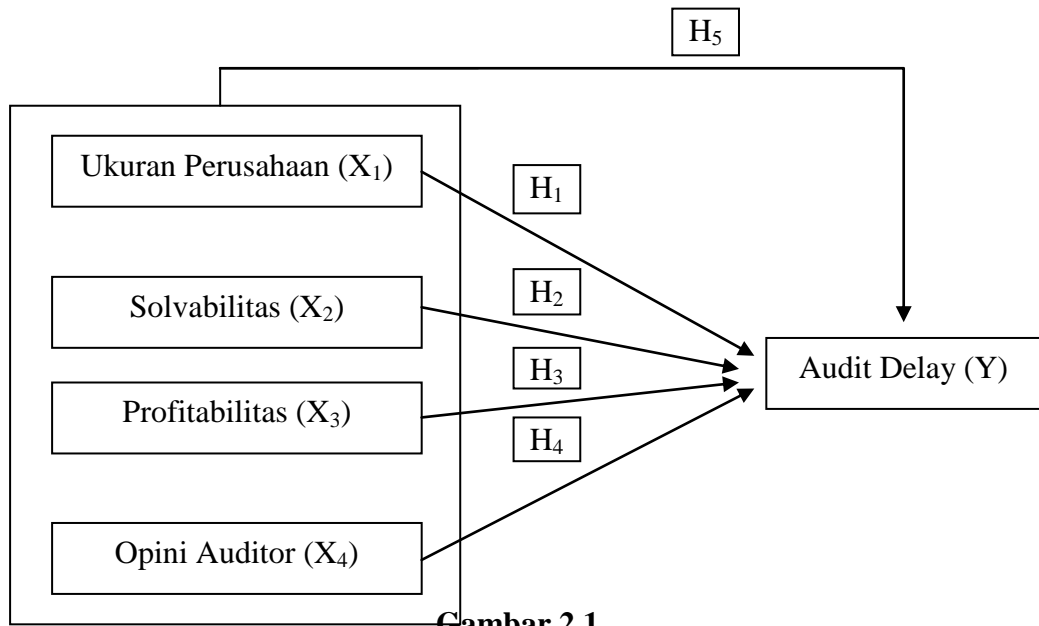
H₄: Terdapat pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI.

H₅: Terdapat pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas dan opini auditor secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Audit delay memiliki pengaruh terhadap tingkat relevansi informasi dalam laporan keuangan, pada akhirnya berdampak pula pada tingkat kepastian keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Hal ini dikarenakan jangka waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan perusahaan. *Audit delay* tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam.

Berpijak pada keterbatasan pengkajian dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan variabel bebas berupa ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan opini auditor. Berdasarkan gambaran tersebut, hubungan antar variabel akan diperlihatkan dalam model penelitian berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian